

**RENCANA AKSI NASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI
 BIDANG PENINDAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
 TAHUN 2004-2009**

Sub Isu	Kegiatan	Indikator	Waktu	Pelaksana	Program PJM terkait	Pembiayaan
		Keluaran/Hasil				
1	2	3	4	5	6	7
Percepatan Penanganan dan Eksekusi Tipikor						
	Menentukan Sektor Prioritas pemberantasan Korupsi untuk menyelamatkan Uang Negara	<p>Keluaran: Prioritas pemberantasan korupsi pada 5 (lima) besar Lembaga Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbesar</p> <p>Hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperjelas langkah-langkah Pemberantasan korupsi 2. Membuka peluang untuk menyelamatkan kekayaan negara dalam jumlah yang besar 3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kesungguhan dan komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi 	Triwulan 1, Tahun 2005	Jampidsus, Kejagung Deputi Penindakan, KPK, Ka Bareskrim, POLRI	Program Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bab XI RPJM 2004 – 2009	APBN Tahun 2005

Sub Isu	Kegiatan	Indikator	Waktu	Pelaksana	Program PJM terkait	Pembiayaan
		Keluaran/Hasil				
1	2	3	4	5	6	7
	Merumuskan dan menetapkan kriteria penentuan prioritas untuk penanganan kasus-kasus korupsi yang telah ada untuk mempercepat penanganan dan penyelesaian kasus.	<p>Keluaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan mengenai batas jumlah kerugian negara sebagai ukuran prioritas kasus korupsi 'besar' 2. Ketentuan mengenai kualifikasi hubungan kasus dengan lembaga pelayanan publik. 3. Penetapan kasus yang memiliki kompleksitas politik yang rendah sebagai prioritas penanganan dengan tujuan untuk mendapatkan '<i>quick wins</i>'/kemenangan mudah. <p>Hasil:</p> <p>Meningkatnya jumlah penyelesaian kasus menyangkut lembaga pelayanan publik dengan jumlah kerugian negara yang besar, sehingga masyarakat langsung dapat merasakan manfaat pemberantasan korupsi.</p>	Semester 1, Tahun 2005	Jampidsus, Kejagung Ka Bareskrim, POLRI	Program Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bab XI RPJM 2004 – 2009	APBN Tahun 2005

Sub Isu	Kegiatan	Indikator	Waktu	Pelaksana	Program PJM terkait	Pembiayaan
		Keluaran/Hasil				
1	2	3	4	5	6	7
	Mempercepat Pembekuan dan pengelolaan aset-aset hasil penyitaan negara.	<p>Keluaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan teknis mengenai kewenangan Pemerintah untuk menjual/ memperdagangkan hasil penyitaan. 2. Mekanisme pengawasan (<i>oversight mechanism</i>) dalam pelaksanaan penyitaan. 3. Terkelolanya aset-aset hasil penyitaan negara dengan lebih baik <p>Hasil: Meningkatnya jumlah pengembalian kekayaan negara dari hasil-hasil penyitaan aset dengan mekanisme pembekuan dan pengadiministrasian penyitaan aset yang baik.</p>	Semester 1 Tahun 2005	Jampidsus Kejagung, Dirjen Perbendaharaan, Depkeu, Deputi Operasional, POLRI Dirjen Imigrasi, DepHukHAM	Program Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bab XI RPJM 2004 – 2009	APBN Tahun 2005
	Melakukan pembatalan terhadap berbagai SP3 perkara-perkara korupsi yang secara hukum masih dapat diproses kembali	<p>Keluaran: Diaktifkannya kembali penanganan kasus-kasus korupsi kontroversial</p> <p>Hasil: Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum</p>	Semester 1, Tahun 2005	Jampidsus, Kejaksaan Agung, Ka Bareskrim, POLRI	Program Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bab XI RPJM 2004 – 2009	APBN Tahun 2005

Sub Isu	Kegiatan	Indikator	Waktu	Pelaksana	Program PJM terkait	Pembiayaan
		Keluaran/Hasil				
1	2	3	4	5	6	7
	Merumuskan Pedoman Pemeriksaan Kesehatan tersangka/terdakwa/saksi khususnya yang menyangkut kasus korupsi	<p>Keluaran: Terselesainya Pedoman Pemeriksaan Kesehatan tersangka/terdakwa/ saksi</p> <p>Hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memperjelas para penegak hukum dalam memperlakukan tersangka/ terdakwa/saksi tidak memenuhi panggilan karena alasan kesehatan. Aparat penegak hukum terhindar dari kemungkinan penyalahgunaan surat keterangan kesehatan oleh tersangka/terdakwa/saksi untuk menghindarkan diri dari proses penegakan hukum. 	Semester 1, Tahun 2005	<p>Jampidsus, Kejaksaan Agung,</p> <p>Ka Bareskrim, POLRI,</p> <p>Deputi Penindakan, KPK,</p> <p>Dirjen Pemasyarakatan, DepHukHAM.</p> <p>Dirjen Binkesmas, Depkes</p>	Program Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bab XI RPJM 2004 – 2009	APBN Tahun 2005
	Melakukan revisi terhadap ketentuan yang mengatur prosedur pemanggilan tersangka dan/atau saksi.	<p>Keluaran: Ditetapkannya revisi terhadap ketentuan yang mengatur prosedur pemanggilan tersangka dan/atau saksi</p> <p>Hasil: Prosedur pemanggilan tersangka/saksi yang sederhana, cepat dan memperlancar proses penanganan perkara korupsi.</p>	Semester 1, Tahun 2005	<p>Jampidsus, Kejaksaan Agung,</p> <p>Kadivbinkum, POLRI,</p> <p>Dirjen Perundang-undangan, DepHukHAM</p>	Program Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bab XI RPJM 2004 – 2009	APBN Tahun 2005

Sub Isu	Kegiatan	Indikator	Waktu	Pelaksana	Program PJM terkait	Pembiayaan
		Keluaran/Hasil				
1	2	3	4	5	6	7
	Mempercepat Proses hukum terhadap pelaku TPK di pusat dan daerah yang melibatkan anggota DPR/DPRD, Kepala Daerah dan pejabat lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia	<p>Keluaran: Ditetapkannya tersangka, proses peradilan dan sanksi hukum bagi pelaku TPK</p> <p>Hasil: Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas para penegak hukum dan sistem peradilan</p>	Triwulan 1, Tahun 2005	Deputi Penindakan, KPK, Jampidsus, Kejagung KaBareskrim, POLRI	Program Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bab XI RPJM 2004 – 2009	APBN Tahun 2005
	Mempercepat proses hukum terhadap penyelewengan Anggaran temuan BPK dan BPKP yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi	<p>Keluaran: Ditetapkannya tersangka, proses peradilan dan sanksi hukum bagi pelaku TPK</p> <p>Hasil: Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas para penegak hukum dan sistem peradilan</p>	Triwulan 1, Tahun 2005	Deputi Penindakan KPK, Jampidsus, Kejagung Ka Bareskrim, POLRI, Auditor Utama Keuangan Negara, BPK, Deputi Bidang Investigasi, BPKP	Program Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bab XI RPJM 2004 – 2009	APBN Tahun 2005

Sub Isu	Kegiatan	Indikator	Waktu	Pelaksana	Program PJM terkait	Pembiayaan
		Keluaran/Hasil				
1	2	3	4	5	6	7
	Mendukung peningkatan jumlah Hakim Ad-Hoc Tipikor untuk menangani perkara-perkara di Pengadilan Tipikor	<p>Keluaran: Dukungan sumberdaya untuk melaksanakan proses rekrutmen dan administrasi hakim-hakim Ad-Hoc Tipikor berdasarkan ketentuan UU No. 20 Tahun 2003</p> <p>Hasil: Meningkatnya penyelesaian perkara-perkara Tipikor di seluruh Indonesia</p>	Semester 1, Tahun 2005	Dirjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Depkeu Sekjen MA		
	Melaksanakan eksekusi terhadap kasus-kasus korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde)	<p>Keluaran: Dilaksanakannya eksekusi terhadap kasus-kasus korupsi yang berkekuatan hukum tetap</p> <p>Hasil: Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas para penegak hukum dan sistem peradilan</p>	Semester 1, Tahun 2005	Jampidsus, Kejaksaan Agung, Dirjen Pemasyarakatan, DepHUKHAM	Program Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bab XI RPJM 2004 – 2009	APBN Tahun 2005
Dukungan terhadap Lembaga Penegak Hukum						
	Membentuk Satuan Tugas (Task Force), terdiri dari ahli/profesional yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi, untuk mendukung lembaga penegak hukum dalam penyelesaian kasus-kasus korupsi yang besar	<p>Keluaran: Terbentuknya Satuan Tugas (task force) pendukung lembaga penegak hukum dalam penyelesaian kasus-kasus korupsi.</p> <p>Hasil: Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus korupsi besar dan menyita perhatian publik, dan terpulihkannya kerugian negara akibat korupsi.</p>	Semester I Tahun 2005.	Jampidsus Kejangung, Deputi Bidang Penindakan KPK, Deops, POLRI, Deputi Bidang Kerjasama Penegakan Hukum, PPATK.	Program Penegakan Hukum dan HAM, RPJM Tahun 2004-2009.	APBN Tahun 2005

Sub Isu	Kegiatan	Indikator	Waktu	Pelaksana	Program PJM terkait	Pembiayaan
		Keluaran/Hasil				
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatkan koordinasi dan persamaan persepsi antara lembaga audit internal dan eksternal pemerintah dengan lembaga penegak hukum	<p>Keluaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dibentuknya forum koordinasi antara lembaga audit dengan penegak hukum. 2. Diadakannya penyesuaian persepsi untuk mengefektifkan hasil audit sebagai dokumen legal <p>Hasil:</p> <p>Berjalannya tindak lanjut temuan hasil audit dan pengawasan secara hukum dengan lancar</p>	Semester 1, Tahun 2005.	<p>Jamwas Kejagung,</p> <p>Kadivpropam, Itwasum, POLRI,</p> <p>Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, KPK,</p> <p>Inspektur Utama Pengawasan Intern dan Khusus, BPK,</p> <p>Deputi Bidang Investigasi, BPKP,</p> <p>Irjen Departemen/LPND,</p>	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	APBN Tahun 2005
Peningkatan Kapasitas Aparatur Penegak Hukum						
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelatihan asset tracing 2. Memberikan pelatihan legal audit 3. Memberikan pelatihan <i>forensic accounting</i>/audit forensic 4. Memberikan pelatihan <i>public relation</i> dalam rangka proses peradilan 	<p>Keluaran:</p> <p>Aparat hukum yang mampu menangani kasus-kasus korupsi dengan kompleksitas tinggi.</p> <p>Hasil:</p> <p>Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus korupsi dengan kompleksitas tinggi</p>	Semester 1, Tahun 2005	<p>Jambin, Kejaksaan Agung,</p> <p>Deputi Bidang Informasi dan Data, Deputi Bidang Penindakan, KPK,</p> <p>Itwasum, POLRI</p> <p>Dirjen Imigrasi, Dirjen Pemasarakatan,</p>	Program Peningkatan Profesi Hukum, Bab IX RPJM 2004 – 2009	APBN Tahun 2005

Sub Isu	Kegiatan	Indikator	Waktu	Pelaksana	Program PJM terkait	Pembiayaan
		Keluaran/Hasil				
1	2	3	4	5	6	7
				DepHuk HAM, Ka Bareskrim Kepolisian,		
Pengembangan sistem pengawasan lembaga penegak hukum						
	Menyempurnakan sistem pengawasan manajerial lembaga penegak hukum.	<p>Keluaran: Kebijakan tentang Akses Publik terhadap Informasi Hasil Pengawasan Penegakan Hukum</p> <p>Hasil: Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas proses penegakan hukum.</p>	Semester 2 Tahun 2005	<p>Jamwas, Kejaksaan, Kadiv Propam, Itwasum, Kababinkam, POLRI</p> <p>Deputi Bidang Investigasi, BPKP,</p> <p>Deputi Bidang Pengawasan, MenPAN,</p> <p>Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, KPK,</p> <p>Komisi Ombudsman Nasional</p>	Program Penegakan Hukum dan HAM, RPJM Tahun 2004- 2005.	APBN Tahun 2005

Sub Isu	Kegiatan	Indikator	Waktu	Pelaksana	Program PJM terkait	Pembiayaan
		Keluaran/Hasil				
1	2	3	4	5	6	7
	Menyempurnakan dan mengimplementasikan pedoman pelayanan pengaduan masyarakat termasuk atas perilaku/sikap personel	<p>Keluaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pelayanan pengaduan masyarakat yang baru 2. Pembentukan unit pelayanan pengaduan masyarakat atas adanya indikasi terjadinya TPK. 3. Peningkatan peranan Komisi Ombudsman Nasional dengan Inpres <p>Hasil: Masyarakat secara pro aktif mendukung upaya pemberantasan korupsi, terutama korupsi di lembaga penegak hukum</p>	Semester 1 Tahun 2006	Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, KPK, Jamwas, Kejagung Kadiv Propam, Itwasum, POLRI	Program Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum, Bab X RPJM Tahun 2004-2005. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara, Bab XII RPJM 2004 – 2009	APBN Tahun 2006
	Mengimplementasikan Standar Profesi/Kode Etik	<p>Keluaran: Aparatur penegak hukum yang menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai dengan Standar Profesi dan Kode Etik Profesi.</p> <p>Hasil: Standar kinerja aparaturnegak hukum yang lebih terukur dan akuntabel.</p>	Semester 1 Tahun 2007	Jambin Kejaksanaan Agung, Kadiv Propam POLRI, Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, KPK, Irjen Mabes TNI, Sekjen Mahkamah Agung, Asosiasi Profesi	Program Peningkatan Profesi Hukum, Bab IX RPJM Tahun 2004-2009.	APBN Tahun 2007

Sub Isu	Kegiatan	Indikator	Waktu	Pelaksana	Program PJM terkait	Pembiayaan
		Keluaran/Hasil				
1	2	3	4	5	6	7
	Melanjutkan upaya mempercepat pembentukan komisi pengawas kejaksaan sebagai lembaga pengawasan eksternal	<p>Keluaran: Peraturan Jaksa Agung tentang pembentukan Komisi Pengawas Kejaksaan</p> <p>Hasil: Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kejaksaan sebagai salah satu ujung tombak dalam pemberantasan korupsi</p>	Triwulan 1, Tahun 2005	Jambin, Kejagung	<p>Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara, Bab XII RPJM Tahun 2004-2009.</p> <p>Program Peningkatan Kinerja Pengadilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya, RPJM Tahun 2004-2005.</p>	APBN Tahun 2005

Sub Isu	Kegiatan	Indikator	Waktu	Pelaksana	Program PJM terkait	Pembiayaan
		Keluaran/Hasil				
1	2	3	4	5	6	7
	Mempercepat pembentukan Komisi Kepolisian Nasional	<p>Keluaran: Peraturan Kapolri tentang pembentukan Komisi Kepolisian Nasional.</p> <p>Hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kinerja Kepolisian khususnya dalam penegakan hukum. 2. Berkurangnya penyimpangan tugas dan wewenang dalam penegakan hukum. 	Triwulan 1, Tahun 2005	Itwasum, Kadiv Binkum, POLRI	<p>Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara, Bab XII RPJM Tahun 2004-2009.</p> <p>Program Peningkatan Kinerja Pengadilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya, RPJM Tahun 2004-2005.</p>	APBN Tahun 2005